

ABSTRAK

Pengelolaan tata ruang merupakan instrumen penting dalam pembangunan daerah untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang tertib dan berkelanjutan. Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya mengalami perkembangan pembangunan yang cukup pesat, namun masih ditemukan berbagai permasalahan seperti alih fungsi lahan, pembangunan di kawasan sempadan sungai, dan lemahnya pengawasan pemanfaatan ruang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dalam pengelolaan tata ruang di Kecamatan Bungursari serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan memanfaatkan sumber data primer dan sekunder. Validitas data diuji melalui teknik triangulasi sumber. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Sedangkan kerangka analisis penelitian ini didasarkan pada teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Lokasi penelitian di Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tata ruang di Kecamatan Bungursari belum berjalan optimal. Meskipun telah terdapat regulasi yang jelas melalui Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, masih ditemukan berbagai pelanggaran pemanfaatan ruang. Faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan meliputi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik badan pelaksana, disposisi pelaksana, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Keterbatasan pengawasan, belum optimalnya koordinasi antarinstansi, serta tingginya tekanan pembangunan menjadi faktor utama yang menghambat implementasi kebijakan tata ruang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan koordinasi antarinstansi untuk mendukung pengelolaan tata ruang yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: kebijakan publik, tata ruang, implementasi.

ABSTRACT

Spatial planning management is an important instrument in regional development aimed at achieving orderly and sustainable land use. Bungursari District, Tasikmalaya City, has experienced rapid development growth; however, various issues remain, such as land-use conversion, development within riverbank areas, and weak supervision of spatial utilization. This study aims to analyze the implementation of the Tasikmalaya City Government's spatial planning policy in Bungursari District and to identify the factors influencing its implementation. This research employed a qualitative approach using a case study method. Data were collected through interviews, observations, and documentation by utilizing both primary and secondary data sources. Data validity was tested through source triangulation. Data analysis was conducted interactively through the stages of data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing. The analytical framework of this study was based on the policy implementation Meter and Van Horn, which emphasizes six main variables. The research was conducted in Bungursari District, Tasikmalaya City. The results indicate that the implementation of spatial planning policy in Bungursari District has not been fully optimal. Although clear regulations have been established through Tasikmalaya City Regional Regulation Number 10 of 2016 concerning Detailed Spatial Planning and Zoning Regulations, various violations of spatial utilization are still found. Factors influencing policy implementation include policy standards and objectives, resources, inter-organizational communication, characteristics of implementing agencies, implementers' disposition, and social, economic, and political conditions. Limited supervision, suboptimal inter-agency coordination, and increasing development pressures are the main factors hindering the implementation of spatial planning policies. Therefore, strengthening supervision and improving inter-agency coordination are necessary to support more effective and sustainable spatial planning management.

Keywords: *public policy, spatial planning, implementation.*